

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.

Ahmad Zalili. 2012. *Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*. Jurnal Kontitusi.Vol.9.

Burhan Asofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta.

BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP: Jakarta.

C.S.T Kansil, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2010, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta.

Eva Hartanti, 2016, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta.

Feri Amsari, 2011, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ian Brownlie, 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Universitas Indonesia (UI Press).

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, sekretariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

\_\_\_\_\_, 2006, *Ilmu Hukum Tata Negara II*, konstitusi pers: Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press.

Mardjono Reksodiputro, 1998, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI*: Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2018, *Politik Hukum Di Indonesia*. Ed.Revisi. Cet.8. Depok: Rajawali Pers.

Miriam Budiardjo. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Garamedia.

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grafindo: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka. 1993. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung.

Topo Santoso, Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, PT.Grafindo Persada: Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi dan Penataannya kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

P.A.F., Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang –Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Uji Materi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Agung No.46/P/Hum/2018 *Tentang Hak Uji Materi Atas Pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf D dan Lampiran Model B.3 Fakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Kab/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.*

## **C. Internet dan Jurnal**

[Http://akurat.co/id-pembatasan-hak-pilih-bagi-mantan-terpidana-korupsi-dalam-perspektif hukum-dan-HAM.](http://akurat.co/id-pembatasan-hak-pilih-bagi-mantan-terpidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-dan-HAM)

[Http://Syafarafuddinidris.blogspot.com/pengertian-pemilu-asas-asas-syarat.](http://Syafarafuddinidris.blogspot.com/pengertian-pemilu-asas-asas-syarat)

[Http://m.hukumonline.com/berita/baca/pencabutan-hak-politik-calon-pejabat-publik-di-momentum-pemilu.](http://m.hukumonline.com/berita/baca/pencabutan-hak-politik-calon-pejabat-publik-di-momentum-pemilu)

[Http://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi.](http://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi)

[Http://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/1381-terpidana-korupsi-dilarang-mencaleg](http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1381-terpidana-korupsi-dilarang-mencaleg).

[Http://merdeka.com/politik/perludem-ungkap-alasan-parpol-tetap-calonkan-eks-napi-korupsi-jadi-caleg.html](http://merdeka.com/politik/perludem-ungkap-alasan-parpol-tetap-calonkan-eks-napi-korupsi-jadi-caleg.html).

Achmad Taufik, 2019, *Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti PILKADA Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/ PPU-XVII/2019*, Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Unira. Volume. 20. Nomor. 2, Dapat dilihat di [Http:// ejournal.unira.ac.id](http://ejournal.unira.ac.id).

Almudatsir Sangadji. 2019. *Perspektif Calon Dan Pencalonan Pemilihan*. Dapat dilihat di [Http://kpu-malukuprov.go.id/perspektif-calon-dan-pencalonan-pemilihan](http://kpu-malukuprov.go.id/perspektif-calon-dan-pencalonan-pemilihan).

Dausat Aditya, 2018, *Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia*, Dapat dilihat di [Http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86651](http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86651).

[Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. 2019. \*Memilih dan Dipilih, Hak Politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum\*. Jurnal HAM. Volume 10. Nomor 2.](#)

[Khairul Fahmi. 2017. \*Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada\*. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 4.](#)

Mia Arlitawati, 2018, *Kewenangan KPU dalam Membatalkan Hak Politik mantan narapidana korupsi dalam Pemilu Legislatif (Analisis putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018*, Penulisan Hukum (Skripsi), UIN Syarif Hidayatullah.

Novianti, 2018, *Implikasi Hukum Putusan MA Terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 Tahun 2018*, Dapat dilihat di [Http://puslit.dpr.go.id](http://puslit.dpr.go.id).

Nur Widyastanti. 2005. *Kedudukan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Dalam Tatanan Konsep Demokrasi Di Indonesia*. Tesis pasca Program Pasca Sarjana. Universitas Indonesia.

Siti Nurul Hidayah. 2018. *Keterwakilan perempuan dalam politik*. Dapat dilihat di [Http:// m.detik.com/news/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik](http://m.detik.com/news/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik).

